
LAHIRNYA PAKISTAN: Perjuangan Muslim India Dan Tantangan Pembangunan Bangsa

Budi darmawan,
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Budi.darmawan@uinib.ac.id,

Endah Regita Cahyani Nazra
SMA Negeri 12 Padang
Endah123@guru.sma.belajar.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pembentukan negara Pakistan sebagai hasil dari konflik dan perbedaan antara populasi Muslim dan Hindu-Buddhis di India. Fokus kajian mencakup latar belakang etnis dan agama yang beragam dengan dominasi Islam sebagai identitas nasional. Metode penilitian yang digunakan adalah metode sejarah dengan 4 tahap, heuristi, kritik, insterpre tasi, dan historiografi. Proses berdirinya Pakistan pada 14 Agustus 1947 merupakan wujud keinginan populasi Muslim untuk memiliki negara terpisah. Tokoh-tokoh kunci seperti Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Ali Jinnah berperan signifikan dalam mewujudkan visi negara Islam ini. Selain itu, penelitian menyoroti perkembangan politik penting, termasuk krisis tahun 2007 dan kontribusi tokoh seperti Benazir Bhutto serta Fazlur Rahman. Pemikiran Fazlur Rahman mengenai transformasi tradisi Islam dalam konteks modernitas turut menjadi bagian dari pembahasan. Aspek ekonomi Pakistan, seperti industri tekstil, pengolahan makanan, kimia, dan petrokimia, serta sumber daya alam seperti gas alam dan minyak bumi, juga dikaji. Penelitian ini turut membandingkan kebijakan pendidikan di Pakistan dengan Indonesia, di mana Pakistan menerapkan wajib belajar hingga tingkat SLTA, sementara Indonesia hingga SLTP. Sistem pendidikan kedua negara memiliki kemiripan dengan keberadaan lembaga pendidikan umum, madrasah, serta perguruan tinggi umum dan keagamaan.

Kata Kunci: Pakistan, Pembentukan Negara, Tokoh Sejarah.

Abstract

This study discusses the formation of Pakistan as a result of conflicts and differences between the Muslim and Hindu-Buddhist populations in India. The focus of the research includes the diverse ethnic and religious

background, with Islam as the dominant national identity. The research employs the historical method, consisting of four stages: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The establishment of Pakistan on August 14, 1947, reflects the Muslim population's desire for a separate state. Key figures such as Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, and Muhammad Ali Jinnah played significant roles in realizing the vision of an Islamic state. Additionally, the study highlights major political developments, including the 2007 crisis and the contributions of figures such as Benazir Bhutto and Fazlur Rahman. Fazlur Rahman's thoughts on the transformation of Islamic traditions in the context of modernity are also part of the discussion. The economic aspects of Pakistan, such as the textile, food processing, chemical, and petrochemical industries, as well as natural resources like natural gas and petroleum, are analyzed. The study also compares educational policies in Pakistan and Indonesia, where Pakistan mandates compulsory education up to senior high school, while Indonesia limits it to junior high school. Both countries share similarities in their education systems, including public schools, madrasas, and general and religious higher education institutions.

Keywords: Pakistan, State Formation, Historical Figures.

A. Pendahuluan

Pakistan pada awalnya merupakan bagian dari India yang berada di bawah penjajahan Inggris. Setelah India merdeka dan menjadi negara berdaulat, muncul ketegangan antara kelompok Muslim dan Hindu-Buddha akibat perbedaan agama, etnis, dan kepentingan. Konflik berkepanjangan ini memicu pertumpahan darah di berbagai wilayah, sehingga pemisahan wilayah menjadi solusi yang diambil untuk meredakan ketegangan. Akhirnya, lahirlah negara Pakistan sebagai tempat bagi umat Muslim menjalankan kehidupan dan keyakinan mereka secara bebas, meskipun pemisahan ini menyisakan ketegangan berkepanjangan di kawasan tersebut (Setiawan. 1990).

Ketegangan dan perbedaan inilah yang kemudian melahirkan berdirinya negara merdeka Pakistan. Pada tahun 1993, Pakistan memiliki populasi sekitar 122,8 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Negara ini memiliki keberagaman etnis yang mencakup suku Punjabi sebagai kelompok mayoritas, diikuti oleh suku Sindhi di wilayah selatan, suku Pathan atau Pashtun di barat laut, suku Baluch di kawasan Balochistan, serta kelompok etnis India yang umumnya berada di wilayah perkotaan. Setiap kelompok etnis di Pakistan memiliki bahasa, tradisi, dan budaya yang khas, seperti bahasa Punjabi, Sindhi, Pashto, dan Balochi, sementara bahasa Urdu berperan sebagai bahasa nasional yang menyatukan keragaman tersebut. Keanekaragaman etnis ini mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Pakistan yang berperan penting dalam membentuk identitas nasional serta dinamika sosial dan budaya negara tersebut. Selain itu, Pakistan juga dihuni oleh berbagai kelompok agama, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam (sekitar 97%), sementara kelompok minoritas meliputi Kristen, Hindu, dan Parsi (Setiawan. 1990).

Pakistan meraih kemerdekaan pada 15 Agustus 1947 setelah perjuangan melawan penjajahan Inggris dan ketegangan dengan kelompok Hindu di India. dalam perjuangan menuju kemerdekaan, Sayyid Ahmad Khan memainkan peran penting dengan mengusulkan gagasan komunalisme, yaitu perlunya umat Islam membentuk kelompok sendiri untuk melindungi kepentingan mereka. Gagasan ini muncul dari pengamatannya bahwa terdapat tiga kekuatan utama di India: minoritas Muslim yang rentan, mayoritas Hindu yang dominan, dan pemerintahan Inggris yang menguasai politik serta ilmu pengetahuan. Sayyid Ahmad Khan mendorong umat Muslim untuk bersatu, memperkuat pendidikan, dan membangun identitas kolektif agar mampu bersaing di tengah dinamika tersebut (Ensiklopedi Islam, 1997).

Masyarakat Muslim dan Hindu mewakili dua budaya dan gaya hidup yang berbeda, terlihat dalam aspek seperti makanan, pakaian, sastra, dan cara berpikir. Kaum Muslim berusaha mempertahankan identitas budaya mereka dan tidak ingin menjadi kelompok minoritas di India yang mayoritas Hindu. Melalui Liga Muslim

yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah, umat Islam menuntut pemisahan dari India untuk membentuk negara Islam yang merdeka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis berbagai permasalahan yang muncul terkait perkembangan politik dalam proses pembentukan negara Islam di Pakistan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika politik yang melatarbelakangi berdirinya Pakistan sebagai negara berlandaskan identitas Islam serta mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor politik, sosial, dan budaya berperan dalam membentuk struktur negara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri perkembangan peradaban Islam di Pakistan setelah kemerdekaan, termasuk upaya negara dalam membangun identitas Islam, sistem pemerintahan, serta kontribusi terhadap peradaban Islam secara global. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran politik dalam pembentukan negara dan perkembangan peradaban Islam di Pakistan.

B. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah. Tahapan dalam metode ini meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Daliman, 2012). Heuristik merupakan tahap pencarian sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku karya Ajid Thohir *Studi Kawasan Dunia Islam*, Akbar S. Ahmad *Discovering Islam*, Ira M. Lapidus *A History of Islamic Societies*, Sultan Mahmood dan Fakhur-ul-Islam *"Islam, Secularism and Idea of Pakistan"*, Zainuddin Sardar *The Future of Muslim Civilization*, serta berbagai dokumen dan artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

Tahap berikutnya adalah kritik, yang menurut Kuntowijoyo bertujuan untuk menguji keaslian sumber (kritik eksternal) dan kredibilitasnya (kritik internal). Setelah sumber dikritik, tahapan selanjutnya adalah interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan makna berdasarkan sumber yang telah dikaji. Tahap akhir dalam metode sejarah adalah historiografi, yakni proses penulisan atau penyusunan kembali peristiwa sejarah berdasarkan sumber yang telah dianalisis dan ditafsirkan oleh peneliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Geografis dan Sejarah Masuknya Islam Di Pakistan

Secara geografis, Pakistan berbatasan dengan beberapa negara penting: Uni Soviet (sekarang negara-negara Asia Tengah) di utara, Iran di barat, Afghanistan di barat laut, serta Cina dan India di timur laut. Bahasa nasional negara ini adalah Urdu, yang berfungsi sebagai penghubung antara berbagai kelompok etnis meskipun

bukan bahasa ibu mayoritas penduduk, sedangkan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris. Perekonomian Pakistan didominasi oleh sektor industri, termasuk tekstil, pengolahan makanan, rokok, kimia, karpet, kerajinan kulit, dan petrokimia, yang berkontribusi besar terhadap ekspor negara. Selain itu, sektor pertambangan juga penting, dengan hasil seperti gas alam, minyak bumi, dan bijih besi, yang mendukung berbagai industri dan pertumbuhan ekonomi negara. Di bidang pertanian, komoditas utama meliputi kapas, beras, dan gandum (Thohir, 2009).



Peta wilayah Negara Pakistan (Armansyah, 2023)

Pakistan memiliki luas wilayah yang mencapai sekitar 796.095 kilometer persegi. Negara ini terbagi menjadi empat provinsi utama, yaitu Punjab, North West Frontier Province (NWFP), Balochistan, dan Sindh. Selain keempat provinsi tersebut, terdapat pula sejumlah wilayah administratif khusus, di antaranya Islamabad Capital Territory (ICT), Federally Administered Tribal Areas (FATA), serta Gilgit-Baltistan yang memiliki status otonomi khusus. Ibukota negara Pakistan adalah Islamabad, sebuah kota yang dirancang khusus dengan tata ruang modern untuk memenuhi peran administratif dan pemerintahan. Islamabad terletak di bagian utara negara tersebut dan dikenal sebagai salah satu kota terindah serta paling tertata di Pakistan, terletak di bagian utara dekat Margalla Hills dan Rawalpindi, serta dibangun pada awal 1960-an sebagai kota terencana. Pakistan merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar setelah Indonesia atau peringkat dua di dunia. Penduduknya terdiri dari berbagai etnis masyarakat, termasuk Punjabi, terdapat juga Sindhi, Pathan, Baluch, dan terakhir Muhajir. Sekitar 97% penduduknya beragama Islam, dengan mayoritas Sunni yang umumnya mengikuti Mazhab Hanafi, dan sekitar 10%-15% adalah Syiah, termasuk aliran Ithna 'Asya'ariyah dan Isma'iliyyah. Kelompok minoritas agama lainnya meliputi Kristen, Hindu, dan Parsi (Thohir, 2009).

Menurut catatan dalam *Ensiklopedi Islam*, pada periode berdirinya Dinasti Umayyah, kaum Muslim melakukan perluasan wilayah atau ekspansi ke kawasan

Sindh, yang kini menjadi bagian dari Punjab. Perluasan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja al-Walid I (705-715 M), ketika ia mengutus Muhammad bin Qasim. Pada saat itu, wilayah Sindh dikuasai oleh keluarga Brahmana, kasta tertinggi dalam sistem masyarakat Hindu, sementara mayoritas penduduknya menganut agama Buddha (Ensiklopedi Islam, 1997). Pemukiman dan pendirian pemerintahan terjadi ketika orang-orang dari Dinasti Ghaznawi menjadikan Lahore sebagai ibu kota pada tahun 1021 (Hantings, 1908).

Proses Islamisasi di wilayah Sindh dan Punjab dimulai oleh Mahmud Ghaznawi (971–1030 M), seorang penguasa Turki dari Afghanistan. Ia memanfaatkan runtuhnya Kerajaan Samaniah yang berada di daerah Khurasan diteruskan ke wilayah Transoksania untuk melakukan ekspedisi militer, yang turut menyebarkan ajaran Islam ke daratan India (Hantings, 1908). Pada tahun 1005, Mahmud Ghaznawi berhasil menundukkan para penguasa atau raja-raja Hindu yang mendiami Punjab. Kemudian, pada periode 1021 M, ia menaklukkan Kashmir dan menghancurkan candi Somanat. Selama kampanye dakwah Islamnya, dia berhasil mempengaruhi penduduk setempat untuk memeluk Islam dan merangsang perkembangan ilmu pengetahuan di antara umat Islam (Hantings, 1908).

Abad ke-13, terjadi penyebaran Islam dan mencapai puncaknya ketika periode Dinasti Mughal. Harun Nasution menyatakan, dinasti ini berdiri karena usaha penguasa asal Asia Tengah dengan latar belakang etnis dan agama berbeda dari mayoritas penduduk Hindu, sehingga kehadirannya sering mendapat penolakan. Kerajaan Mughal didirikan oleh Babur pada 1526. Para penguasa Mughal menggunakan gelar kebangsawanan Muslim, seperti Nuruddin (Jahangir), Syihab al-Din (Syah Jehan), dan Muhyiddin (Aurangzeb). Sejarawan modern sering menggambarkan mereka sebagai pemimpin Muslim yang ideal (Ahmad, 1992).

Pengaruh Islam di Kerajaan Mughal sangat kuat sebelum kedatangan penjajah Inggris pada abad ke-17, ketika Islam menjadi pilar utama kekuatan di India. Namun, kelemahan kepemimpinan beberapa raja Mughal menyebabkan kemunduran kerajaan. Pada saat yang sama, kelompok Hindu Maratha mulai bangkit dan membentuk kerajaan independen di India Barat, sementara komunitas Sikh melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Mughal. Munculnya kerajaan-kerajaan kecil semakin mempersempit wilayah kekuasaan Mughal, menyebabkan banyak daerah jatuh ke tangan non-Muslim. Situasi ini menimbulkan isu *dar al-harb* (wilayah di bawah kendali non-Muslim) di daerah yang lepas dari pemerintahan Islam, sedangkan wilayah yang tetap dikuasai disebut *dar al-Islam* (Ahmad, 1992).

2. Proses Terbentuknya Negara Pakistan

Gerakan nasionalisme di Pakistan dimulai ketika terjadi ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim. Ketegangan ada karena Ketidakpuasan umat Islam muncul karena tidak mendapatkan akomodasi politik yang baik dari pihak Kongres

Nasional India Bersatu yang dihuni atau diisi oleh mayoritas Hindu, sehingga memicu kekhawatiran akan terpinggirkannya kepentingan dan hak-hak mereka pada tahun 1885. Setelah Perang Dunia I, komunitas Islam mulai aktif dalam gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan dan pemisahan dari India dengan membangun konsolidasi internal (Thohir, 2009).

Rencana pendirian Negara Islam Pakistan terpisah dengan negara India secara keras ditentang oleh Jami'at al-Ulama, yang berpendapat bahwa pemisahan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Pandangan ini berlandaskan pada kenyataan bahwa India memiliki komunitas Muslim yang beragam dan telah bersinergi dan menyatu dengan harmonisnya. Mereka telah membentuk aliansi bersama dengan pemilik tanah, dan ketika mereka berada di bawah penguasaan Inggris, mereka diberikan hak milik tanah yang kuat dan terlindungi terhadap persaingan secara keuangan atau finansial dengan komunitas Hindu. Bahkan, sebagian dari mereka mendapatkan tanah tambahan. Pada tahun 1945, Liga Muslim memegang teguh keyakinan bahwa, terlepas dari kepentingan lokal mereka, adalah mutlak untuk mendirikan Negara Muslim yang dikelola oleh Muslim guna mempertahankan prinsip-prinsip kehidupan Muslim. Konsep pembentukan negara terpisah untuk komunitas Muslim dimulai dengan gagasan komunalisme yang pertama kali diusulkan oleh Sayyid Ahmad Khan. Gagasan ini berkembang menjadi rumusan Pakistan sebagai negara yang merdeka bagi komunitas Muslim, dan pertama kali diungkapkan oleh Muhammad Iqbal. Iqbal menyatakan bahwa India memiliki dua bangsa utama yang menjadi komponennya, yaitu Muslim dan Hindu, sehingga komunitas Muslim perlu membentuk negara terpisah. Dalam musyawarah Liga Muslim 1930 dimana rapat ini diadakan tahunan, Iqbal memberikan ususannya secara resmi mengusulkan penyatuan Punjab, yang terdiri dari beberapa wilayah yaitu: Perbatasan Utara, Sindh, dan Baluchistan agar dapat menjadi satu negara. Gagasan ini menjadi titik awal perjuangan nasional Muslim untuk mendirikan negara terpisah dari India (Nasution, 1987). Maka tidaklah mengherankan bahwa Iqbal dianggap sebagai tokoh yang diakui sebagai pelopor ideologi Pakistan, sementara tugas Ali Jinnah adalah mewujudkan visi untuk menjadikan Pakistan sebagai negara Islam yang merdeka.

Muhammad Ali Jinnah memulai perjuangan untuk mewujudkan visinya dengan bekerja sama dengan Liga Muslim sebagai organisasi terbesar muslim disana, dan tak luput juga upaya kerja sama yang dilakukannya juga bersama Kongres Nasional India dan para pemimpinnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menyadari kesulitan dalam menciptakan persatuan nasional antara komunitas Hindu dan Muslim, seiring dengan pemahaman yang semakin jelas tentang dinamika masyarakat India yang sedang berkembang (Ensiklopedi Islam, 1997).

Tahun 1913, terpilihnya Muhammad Ali Jinnah sebagai presiden Liga Muslim India menjadi gabungan kekuatannya lembaga tersebut. Ketika Gandhi mendorong konsep nasionalisme India yang menyatukan Muslim dan Hindu, Jinnah mengundurkan diri dan pindah ke London untuk berkarier sebagai pengacara. Namun, atas permintaan rekan-rekannya, ia kembali dan kembali memimpin Liga

Muslim, menjadikannya gerakan yang lebih kuat di bawah kepemimpinannya (Nasution 1987).

Ketika Ali Jinnah kembali memimpin Liga Muslim, dia memulai serangkaian tindakan baru untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Muslim India. Langkah awalnya adalah memperkuat Liga Muslim caranya adalah dengan mengadakan sidang pertahunnya. Pada sidang yang mengambil tempat di Bombay April tahun 1936 dilakukannya penyempurnaan konstitusi organisasi agar akomodasi demokrasi menjadi lebih kuat lagi. Ia kemudian membentuk struktur organisasi lebih siap dalam masa pemilihan yang akan datang baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, ia juga mendatangi berbagai wilayah guna menggalang dukungan bagi calon-calon Liga Muslim (Ali, 1993).

Pada awalnya, Ali Jinnah belum berhasil menunjukkan pengaruh besar. Dalam pemilihan majelis provinsi 1937, Liga Muslim kalah telak, sementara Partai Kongres mendominasi. Saat itu, Nehru dengan percaya diri menyatakan di kekuatan politik besar hanya ada 2 entitas yaitu: Partai Kongres dan pemerintah Inggris, sementara Liga Muslim tampaknya tidak memiliki peran yang signifikan. Hal ini memperkuat ketegangan antara Hindu dan Islam, dan semakin mengakibatkan terpinggirkannya komunitas Muslim dalam ranah politik. Menanggapi hal ini Ali Jinnah tidak menerimanya begitu saja. Bagi Ali Jinnah, jalan keluar paling pas untuk menyelesaikan ketegangan antara Hindu dan Islam di India adalah dengan menciptakan negara mereka sendiri bagi komunitas Muslim. (Sardar, 1993).

Dari sinilah dimulai perjuangan umat Islam untuk mendirikan Negara Islam Pakistan. Kesepakatan untuk menciptakan negara yang berdiri sendiri bagi komunitas Muslim India menjadi tujuan utama perjuangan Liga Muslim, dan kesepakatan ini diresmikan pada tahun 1940 dalam kegiatan rapat tahunan dari Liga Muslim. Dalam rapat tersebut, negara baru diberi nama "Pakistan". Nama ini dikatakan berasal dari ide Khawaja Rahmat Ali, seorang mahasiswa India di London, yang terinspirasi oleh pidato Iqbal tentang negara Muslim. Nama "Pakistan" diambil dari huruf awal lima wilayah: "P" (Punjab), "A" (Afghanistan), "K" (Kashmir), "S" (Sindh), dan "Tan" (Baluchistan). Sumber lain menyebutkan bahwa "Pakistan" berasal dari bahasa Persia, di mana "Pak" berarti suci dan "Stan" berarti negara, sehingga "Pakistan" berarti "Negara yang Suci" (Nasution, 1987).

Dengan adanya persetujuan tegas ini, Liga Muslim berhasil meraih dukungan luas dari komunitas Muslim, yang secara signifikan memperkuat posisinya sebagai representasi utama kaum Muslim di India. Sementara itu, para pemimpin Muslim yang sebelumnya tergabung dalam Kongres Nasional India mulai kehilangan pengaruh mereka di kalangan masyarakat. Bahkan, sebagian dari mereka memutuskan untuk keluar dari Kongres dan beralih mendukung Liga Muslim. Kondisi ini semakin memperkuat posisi Ali Jinnah dan Liga Muslim sebagai kekuatan politik utama yang mewakili aspirasi Muslim. Hal ini terlihat jelas dalam pemilihan tahun 1946, di mana Liga Muslim berhasil meraih suara mayoritas di

berbagai daerah, menegaskan dominasinya dalam perjuangan politik untuk pembentukan negara Muslim terpisah (Lapidus, 1999).

Liga Muslim dan Ali Jinnah sebagai pemimpinnya dalam gerakan pemisahan memberi dampak besar pada Partai Kongres, yang berusaha keras menghadang pengaruh tersebut. Pada 1944, terjadi rapat yang sangat sengit di antara Jinnah dan Gandhi dengan pembahasan tentang adanya kemungkinan kerjasama melawan pemerintahan Inggris, namun gagal karena perbedaan pandangan mengenai masa depan India. Pada tahun yang sama, Jinnah mempertimbangkan dua isu penting tentang Pakistan, yaitu masalah geografi dan bentuk pemerintahannya, yang direncanakan menggunakan sistem demokrasi (Smith, 1979).

Selanjutnya tahun 1945, pihak Inggris memulai perbincangan akan kemerdekaan dari India, tetapi terus menemui kegagalan. Akhirnya, Inggris menghadirkan pemerintahan sementara dan dikelola dari masyarakat India, yang ditentang keras oleh Ali Jinnah, ia merasa keputusan ini sepihak dan berpotensi menyebabkan konflik. Jinnah berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut, sidang Dewan Konstitusi yang diadakan di Desember 1946 tidak mungkin terlaksana. Pada tahun berikutnya, Inggris mengumumkan rencana untuk memberikan kedaulatan tidak hanya pada satu konstitusi saja namun pada dua dewan konstitusi, yaitu Pakistan dan juga India, sehingga pada 14 Agustus 1947, Pakistan dengan Dewan Konstitusinya dibuka keesokan harinya Pakistan memerdeka diri menjadi sebuah negara untuk umat Muslim India. Hal ini dilanjutkan dengan diangkatnya Ali Jinnah sebagai Gubernur jenderal, selanjutnya, rakyat Pakistan memberinya gelar dengan Qaid-i-Azam (Ensiklopedi Islam, 1997).

3. HUKUM DAN PERPOLITIKAN DI PAKISTAN

Sejak berdirinya Pakistan, komunitas Muslim berusaha menerapkan konsep Islam dalam negara, memulai pencarian panjang tentang esensi negara Islam. Isu ini menjadi perdebatan antara tokoh-tokoh Islam di Pakistan, baik tokoh yang berlatar belakang pendidikan Barat maupun Islam atau para ulama. Majelis Ulama mengusulkan bentuk atau sistem pemerintahan dengan berpedoman kepada Undang-Undang dari sidang Liga Muslim yang terselenggara pada Maret 1940, yang menekankan prinsip-prinsip keislaman bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis, ditambah asas demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan, toleransi, serta keadilan sosial yang sesuai dengan agama Islam (Ensiklopedi Islam, 1997).

Konstitusi yang disusun pada 1940 oleh Liga Muslim, yang kemudian disahkan pada 1956, dengan nama negara "Republik Islam Pakistan." Namun, definisi identitas Islam negara tersebut menjadi sulit. Perdebatan di Majelis Konstituante serta adanya kompromi yang hadir pada kelompok tradisional dan modernis tercermin keahadirannya dalam konstitusi yang terbentuk pada 1956, serta serangkaian amandemen kontroversial. Pada 1962, konstitusi direvisi dan menghapus kata "Islam," menggantikannya dengan pembentukan atas lembaga-

lembaga yaitu: Dewan yang bergerak dalam penasehat ideologi Islam dan lembaga yang mengemban mengenai penelitian Islam. Dua lembaga ini bertujuan menghadirkan penekanan dan defenisi yang lebih rasional dan liberal tentang prinsip dasar Islam, seiring dengan perkembangan yang pesat pada dunia modren dalam hal intelektualitas dan ilmiah (Esposito, 1986).

Dalam konteks hukum Islam, komunitas Muslim Pakistan, dua yaitu: Lembaga Penelitian Islam dan Dewan Penasehat Ideologi Pakistan, menghadapi perdebatan antara kaum modernis dan tradisional. Kaum modernis berpendapat bahwa hukum Islam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, sedangkan dari sisi kaum tradisional menegaskan penerapan hukum fiqh yang bersumber atau berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak ada sudut komprominya. Hal kontroversial mengenai isu seperti zakat, riba, perencanaan keluarga, dan hukum keluarga Islam menunjukkan kesulitan Pakistan dalam menerapkan syariah dalam konteks negara mereka (Esposito, 1986).

Di Pakistan, terdapat perbedaan pendapat tajam mengenai program keluarga berencana antara kelompok modernis dan tradisional. Kelompok modernis berperan dalam dukungannya atas kontrol kepada penduduk supaya mengatasi masalah tingkat kelahiran yang terbilang tinggi, dengan Lembaga Riset Islam yang dikelola oleh Zia-Ul-Haq mengeluarkan hukum dengan berfatwa yang mendukung program ini, mengacu pada pandangan Mahmud Syaltut dari al-Azhar. Sebaliknya, kelompok tradisional menolak kontrol penduduk, menganggap kontrasepsi sebagai potensi penyebab perilaku seksual yang tak terkendali. Bahkan, dalam sebuah konferensi ulama, program ini dibandingkan dengan tindakan Firaun yang membunuh anak laki-laki Bani Israil. Kaum modernis pun kesulitan menghubungkan nilai modern dengan warisan tradisional mereka.

Di sisi lain, kaum tradisional juga mengalami kesulitan dalam melepaskan diri sepenuhnya dari realitas masa kini dan mencari keamanan dalam masa lalu. Kaum modernis menuduh kaum tradisional terlalu menghormati sejarah daripada nilai-nilai agama, karena cenderung untuk meromantisasi masa lalu. Kaum tradisional menuduh kelompok modernis memiliki pandangan negatif terhadap syariah Islam yang diterapkan dalam konteks Barat, serta menolak otoritas masa lalu. Hal ini menyebabkan kebingungannya dalam mendefinisikan Islam, yang berpengaruh kepada pengalaman yang didapat di Pakistan. Pencapaian Kompromi dianggap tidak memuaskan baik kelompok modernis yang ingin modernisasi maupun kelompok tradisional yang ingin mempertahankan status quo. Kontroversi ini akhirnya meluas menjadi tindakan-tindakan seperti penjarahan, pembakaran, terorisme, dan pembunuhan, terutama selama masa pemerintahan Muhammad Ayub Khan (Sadzali, 1993).

Zulfikar Ali Bhutto, pemimpin baru Pakistan setelah Muhammad Ayub Khan, mengusung ide baru untuk negara dengan menggabungkan Islam dan sosialisme, apalagi tentang keadilan sosial. Pada periode pemerintahan Bhutto ini

Pakistan mengadakan pemilu umum pertama pada 1977. Sebelum pemilu, Bhutto mengundang imam dari Masjid Nabawi dan Masjid al-Haram, mewajibkan dengan kualitas terbaik menyediakan Al-Qur'an di setiap kamar, serta melarang pengadaan klub malam, perjudian, dan begitu pula jual beli alkohol. Pada pemilu ini menimbulkan ketegangan yang kuat, karena partai oposisi merasa tidak puas dengan hasilnya. Partai Bhutto berhasil memenangkan 155 dari jumlah 200 kursi yang tersedia pada jabatan Dewan Rakyat, yang keseluruhan totalnya adalah 216 anggota. Protes berlarut-larut menyebabkan Bhutto membuat undang-undang untuk menyelesaikan keadaan darurat dan ia memerintah dengan keras atau dalam istilahnya pemerintahan tangan besi. (Ensiklopedi Islam, 1997).

Pada tahun 1977, militer di bawah Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq menjatuhkan Bhutto dan memegang kekuasaan di Pakistan. Bhutto dihukum mati pada 4 April 1979 atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan lawan politiknya. Zia-ul-Haq, dikenal sebagai seorang muslim taat, memulai islamisasi Pakistan dengan menerapkan hukum Islam pada Februari 1979. Ia juga mendirikan lembaga untuk memungkinkan warga mencari keadilan terhadap pejabat pemerintah. Federal Ombudsman (Wafiki Mohtasib) yang didirikan pada Januari 1983 berhasil menyelesaikan sekitar 94.500 dari 105.500 keluhan dalam dua tahun (Sadzali, 1993). Zia-ul-Haq, yang dianggap sebagai diktator, tidak hanya menghukum mati Ali Bhutto, tetapi juga menahan pendukungnya, termasuk putrinya, Benazir Bhutto, yang dipenjara karena menentang rezimnya. Pada 1982, Benazir diasingkan setelah tiga tahun di penjara, lalu pergi ke London untuk mencari dukungan. Pada 1986, ia kembali ke Pakistan untuk melawan Zia-ul-Haq. Setelah Zia diketahui meninggal pada 17 Agustus 1988 akibat kecelakaan pesawat, Partai Rakyat Pakistan (PPP) dibawah kepemimpinan Benazir Bhuttoakhirnya kembali memenangkan pemilu (Ma'arif, 2008).

Pada 1988, Benazir Bhutto berhasil menduduki jabatan perdana menteri Pakistan setelah Partainya mengalahkan kekuatan berpengaruh lainnya di Pakistan Aliansi Demokrasi Islam. Dengan kemenangan ini, Pakistan mencatat sejarah sebagai negara Islam pertama yang dipimpin oleh perdana menteri perempuan, meskipun beberapa ulama menentang kepemimpinan perempuan. Pada 1990, Benazir digantikan oleh Nawaz Sharif setelah dituduh korupsi. Nawaz Sharif kemudian digulingkan oleh Pervez Musharraf dalam kudeta 1999, yang pada 2001 menjadi Presiden Pakistan (Ensiklopedi Islam 1997).

Pada 2007, Presiden Pervez Musharraf diberi desakan untuk melakukan pengunduran diri, mengkritik pemerintahan militer yang dianggap merugikan Pakistan. Mereka juga menuntut kembalinya mantan perdana menteri mereka yaitu Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif agar kembali ke Pakistan. Krisis di Pakistan dimulai ketika dua madrasah negara tersebut mengumumkan rencana penerapan syariat Islam di seluruh negara. Konflik ini eskalasi setelah santri dari madrasah tersebut menyandera beberapa individu, menyebabkan pengepungan dan konflik

dengan pemerintah. Penegakan hukum terhadap madrasah ini memicu ketegangan yang berujung dengan terjadinya tindakan pengepungan pada Mesjid Merah dan madrasah pada Juli tahun 2007. Peristiwa ini menyebabkan Presiden Musharraf menghadapi instabilitas dan akhirnya mengumumkan keadaan darurat pada November 2007. Sebelumnya pada Oktober 2007 Benazir Bhutto diinformasikan sudah berada Pakistan, namun meskipun belum ada kesepakatan dengan Musharraf, ia tragisnya tewas pada 27 Desember 2007 saat kegiatan kampanyenya bersama PPP. Identitas pembunuhnya masih belum pasti, tetapi beberapa spekulasi menunjuk pada kelompok ekstremis yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. (Ma'arif, 2008).

4. Tokoh-Tokoh Muslim Berpengaruh Pakistan

Negara Republik Islam Pakistan terbentuk dari banyak hal yang merupakan hasil kontribusi berbagai tokoh yang mengemukakan pandangan dan gagasan mengenai pembentukan negara ini. Beberapa tokoh kunci yang berperan dalam proses tersebut adalah:

a. Sayyid Ahmad Khan

Sayyid Ahmad Khan, keturunan Sayyid Muhammad Muttaqi Khan ia merupakan sosok kelahiran di Delhi pada 1817, berperan penting dalam perkembangan masyarakat muslim pada masa masih tergabung dengan India, khususnya di bidang edukasi. Gagasan dan pemikirannya tercermin dalam karya-karya tentang sejarah, agama, dan pendidikan,

Sayyid Ahmad Khan menghasilkan sejumlah karya penting yang mencakup berbagai bidang. Di antaranya adalah *Asrar Al Sanadid* (1847) yang mengkaji tema keilmuan arkeologi, *Jam I-jam* (1940) yang mengulas sejarah panjang dari dinasti Mughal, begitu pula dengan *Silsilat Al-Muluk* (1852) yang juga membahas sejarahnya. Dalam *The Loyal Muhammadans of India* (1860), ia mengkaji dan menuliskan tentang tokoh-tokoh yang dipandang mendukung pihak kolonial Inggris selama terjadinya pemberontakan Mutiny. Karya lainnya, seperti *The Causes of Indian Revol*, menganalisis penyebab Revolusi India, sementara *Tarikh I-Firuz Shah* membahas sejarah Firuz Shah dan *Tuzuk i-Jahangiri* berisi catatan pribadi Jahangir. Sayyid Ahmad Khan memiliki karya lainnya seperti *Tafsir al-Qur'an* dan *Risalah Ibtal al-Ghulami* (1893) yang mengulas mengenai penghilangan perbudakan dalam dunia Islam. Karya lainnya, *Tabyin al-Kalam fi Tafsir al-Taurat wa al-Injil ala Mullat al-Islam*, menghadirkan bahasan akan bible atau kitab Injil yang menggambarkan Nabi Muhammad, serta *Tahzib al-Akhlaq* (majalah) yang membahas etika. Sayyid Ahmad Khan tutup usianya pada tanggal 27 bulan Maret tahun 1898 yakni saat usianya menginjak 81 tahun setelah menderita penyakit yang berlangsung cukup lama (Uslam, 2020). Dalam pemikirannya terkait pembentukan Republik Islam Pakistan, Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa umat Islam di subkontinen India harus mempertimbangkan pembentukan entitas mereka sendiri. Dasar dari

pemikiran Sayyid Ahmad Khan yaitu pengamatan terdapat tiga kelompok yang mendominasi di India pada saat itu, yaitu pemerintah Inggris, umat Hindu, dan umat Islam (Wulandari 2021).

b. Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal merupakan tokoh Pakistan yang lahir di Sialkot, Punjab, pada tahun 1876 M, nama lengkapnya adalah Muhammad Iqbal bin Muhammad Nur bin Muhammad Rafiq. Awalnya, keluarganya memiliki latar belakang agama Hindu dan merupakan bagian dari kelompok Brahman Kashmir yang terhormat (Masykur, 2018). Namun, ia kemudian berpindah keyakinan ke Islam. Muhammad Iqbal memiliki dampak yang signifikan pada umat Islam dunia, di Pakistan sendiri melalui pemikirannya yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Ide-ide dan konsep yang ia sampaikan mencakup:

- Bidang Agama

Muhammad Iqbal mengembangkan pemikirannya di bidang agama, dengan pandangan bahwa Islam adalah agama dinamis, bukan statis. Iqbal melihat Al-Qur'an merupakan pondasi dan pedoman hidup masyarakat menjadi dasar hukum yang menghadirkan panduan untuk kehidupan yang dinamis. Ia melakukan ijtihad, yaitu usaha untuk mendapatkan pemahaman dan penyelesaian atas masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat, dengan dasar pada ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. Al-Ankabut: 69.

- Bidang Pendidikan

Muhammad Iqbal adalah seorang cendekiawan dengan latar pendidikan yang di Inggris dan berkontribusi pada bidang pendidikan. Kontribusinya mencakup prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi dunia pendidikan yang berfokus pada hasil dan tujuan dari pendidikan, antara lain:

1. Individualitas sebagai sebuah konsep dalam pendidikan.
2. Pertumbuhan individualitas sebagai tujuan pendidikan.
3. Pemahaman bahwa aspek jasmani dan rohani harus sejalan dalam pendidikan.
4. Memandang evolusi kreatif sebagai elemen penting dalam pendidikan.
5. Mengintegrasikan fungsi intelek dan institusi dalam pendidikan.
6. Menekankan pendidikan karakter.
7. Memasukkan kehidupan sosial sebagai hal yang sifatnya prinsip bagi Islam dalam pendidikan.
8. Menyuarakan dalam Islam dan dunia pendidikan pandangan yang kreatif bagi perkembangan bangsa.
9. Merujuk pada bidang yang sifatnya filsafat dan memasukkan pemahamannya yang berbasis pada Al-Qur'an dalam proses pendidikan. Iqbal menganggap ilmu pengetahuan sebagai kunci untuk memahami alam, ilmu sosial, dan sejarah, yang akhirnya mengarah pada

pemahaman tentang Tuhan (Ma'rifat Allah) sebagai kesempurnaan ilmu pengetahuan.

Dengan pandangan ini, Muhammad Iqbal memainkan peran penting dalam mempromosikan konsep pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan memahami pentingnya pengetahuan dalam memahami alam semesta dan hubungan manusia dengan Tuhan. (Maimun, 2018).

c. Muhammad Ali Jinnah

Muhammad Ali Jinnah adalah tokoh kunci dari dalam pendirian negara Pakistan. Ia lahir pada tanggal 25 Desember 1876. Awalnya, Jinnah adalah berprofesi sebagai pengacara yang pada akhirnya terlibat dalam pergolakan politik di India. Pada tanggal 23 Maret 1940, ia memimpin Liga Muslim dalam perjuangan untuk mendapatkan wilayah bagi umat Muslim di bawah pemerintahan Britania Raya di India. Selain itu, Muhammad Ali Jinnah diketahui juga menduduki jabatan sebagai gubernur pertama Pakistan. (Mukhtar, 2018).

Liga Muslim yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah berargumentasi bahwa umat Muslim adalah sebuah kelompok yang berbeda dan mereka menekankan pentingnya pemisahan dari India. Dalam kerangka Gerakan Pakistan, Liga Muslim secara aktif bekerja untuk mendapatkan dukungan untuk tujuan ini, dan mereka tidak melupakan aspek ekonomi yang relevan dalam proses tersebut. Selama perjuangan untuk mendirikan Pakistan, umat Muslim diajak untuk bersatu dalam nama Islam, dan Muhammad Ali Jinnah berupaya keras untuk memenangkan dukungan dari para Ulama dan Mashaikh. Pada saat ini, kelompok Liga Ulama yang mendukung kaum Muslim aktif terlibat dalam gerakan Liga Muslim dan menawarkan jaminan bahwa Pakistan akan menjadi sebuah negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Essa, 2021).

Muhammad Ali Jinnah meyakini bahwa struktur terdapat pembenahan dan penanaman prinsip Islam yang harus yang terjadi pada keadaan politik dan konstitusional. Dalam sebuah pidato yang dia sampaikan kepada rakyat Amerika Serikat pada tahun 1948 pada bulan Februari, ia menyampaikan, kalau Konstitusi Pakistan nantinya merupakan cerminan model demokratis yang menggambarkan esensi Islam. Dalam menjelaskan hubungan yang harmonis dari Islam dengan hubungannya terhadap prinsip demokrasi disana, Muhammad Ali Jinnah juga menegaskan "agama Islam beserta ajarannya sudah memberikan masyarakat dasar dari demokrasi." Pada sebuah pertemuan Liga Muslim All-India di Lucknow di tahun 1916, Jinnah menyatakan pendapatnya, "Tidak ada kelompok lain di dunia ini yang demokratis sebagaimana kaum Muslim, bahkan dalam praktek agama mereka." Ia berpendapat demokrasi dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya adalah ciri yang paling mencolok yang juga dimiliki oleh masyarakat Muslim (Mahmood, 2021).

d. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman merupakan kelahiran di Hazara, Pakistan, ia lahir di tanggal 19 September 1919. Latar belakang pendidikan Fazlur Rahman dipengaruhi oleh keluarga yang religius. Ayahnya, Maulana Syihabuddin, adalah seorang lulusan dari Madrasah Dar al-Ulum Deoband dan seorang ulama yang terkemuka, guru di sekolah di sekolah terkemuka di wilayah Indo-Pakistan. Bahkan sejak usianya menginjak 10 tahun, ia telah menasbikan dirinya sebagai hafiz Al-Qur'an dan menerima pendidikan agama Islam yang mendalam. Tulisan-tulisannya dan perkembangan pemikiran dari seorang Fazlur Rahman bisa dibagi menjadi tiga tahapan dimulai dari pembentukan, perkembangan, dan akhirnya kematangan. Uraian mengenai tahap-tahap karya dan perkembangan Fazlur Rahman adalah sebagai berikut:

- 1) *Avecinna's Psychology* membahas Ibnu Sina dari perspektif pemikirannya yang terkandung pada kitab *An-Najat*.
- 2) *Avicenna's De Anima, Psychological Part of Kitab al-Shifa* membahas revisi dari bagian *al-Nafs* yang terdapat dalam karya *Kitab al-Shifa*.
- 3) *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy* merupakan salah satu hasil karyanya yang penting Fazlur Rahman pada periode ini, karya ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya minat para sarjana muda terhadap ilmu-ilmu kenabian.

Pada periode tersebut, Fazlur Rahman berangkat ke Chicago. Tulisan-tulisan dari Fazlur Rahman selama periode Chicago ini banyak mengkaji hal-hal seperti penelitian-penelitian tentang Islam normatif dan sejarah, termasuk:

- 1) *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi* yang mngular tentang sejarah pemikiran Shadr al-Din al-Shirazi dalam konteks analisis Fazlur Rahman.
- 2) *Major Themes of the Qur'an*, karya dari tokoh Fazlur Rahman, mengulas delapan tema utama dalam Al-Qur'an, antara lain: konsep ketuhanan, manusia sebagai makhluk dengan individual dan sosialnya, juga mengenai kenabian dan juga wahyu, alam semesta, hari akhir, kejahatan atau kebajikan, serta tak luput juga sejarah peradaban Islam.
- 3) *Islam and Modernity: Transformation of Islamic Tradition* adalah buah dari ketekunan penelitian dari Fazlur Rahman bekerjasama dengan para sarjana muda, yang mengangkat studi kritis terhadap sejarah perkembangan pengetahuan dan juga pendidikan agama Islam, dari masa lalu sampai pada era modern (Fazlurrahman, 2018).

D. Kesimpulan

Pakistan adalah negara yang terbentuk sebagai hasil dari konflik dan perbedaan antara populasi Muslim dan Hindu-Buddhis di India. Pakistan merupakan negara dengan keberagaman etnis dan agama yang mencerminkan

kompleksitas budayanya, di mana Islam menjadi agama mayoritas dan berperan sebagai fondasi identitas nasional. Keanekaragaman ini tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang dinamis. Di bidang ekonomi, Pakistan memiliki sejumlah industri utama yang menjadi tulang punggung perekonomian, seperti industri tekstil yang mendominasi sektor manufaktur, pengolahan makanan, kimia, produksi karpet, barang-barang kulit, dan petrokimia. Selain sektor industri, negara ini juga dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang meliputi gas alam, minyak bumi, serta bijih besi, yang mendukung kebutuhan energi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, sektor pertanian juga memiliki peran signifikan dalam ekonomi Pakistan, dengan komoditas utama seperti kapas, beras, dan gandum yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pedesaan sekaligus berkontribusi pada ekspor. Kombinasi antara industri, sumber daya alam, dan sektor pertanian menjadikan Pakistan sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar dan beragam. Pembentukan negara Islam Pakistan berawal dari keinginan kuat umat Muslim di anak benua India untuk memiliki negara yang melindungi hak dan identitas keagamaan mereka. Dipimpin oleh tokoh seperti Muhammad Ali Jinnah dan didukung Liga Muslim, perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil. Pada 14 Agustus 1947, Dewan Konstitusi Pakistan resmi dibuka, dan keesokan harinya, 15 Agustus 1947, Pakistan lahir sebagai negara berdaulat bagi umat Islam. Pembentukan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan umat Muslim di Asia Selatan. Pembahasan juga terdapat tentang tokoh-tokoh seperti Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Ali Jinnah memainkan peran penting dalam mewujudkan visi ini. Teks ini juga membahas peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah politik Pakistan, termasuk krisis pada tahun 2007 dan peran penting tokoh seperti Benazir Bhutto dan Fazlur Rahman. Karya-karya Fazlur Rahman juga disebutkan, yang mencakup pemikiran tentang sejarah pemikiran Islam dan transformasi tradisi Islam dalam konteks modernitas.

Daftar Pustaka

- Ach Maimun, "Filsafat Dinamis-Integralistik; Epistemologi Dalam Pemikiran Muhammad Iqbal," *Kabilah*, Vol. 3, 2018.
- Ahmad Syafi'i Maarif, "Benazir Bhutto Tentang Dunia Islam" dalam Muhammadiyah Online. Tanggal 16 April 2008.
- Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Akbar S Ahmad, *Discovering Islam*, diterjemahkan oleh Nundig Ram dan Ramli Yaqub dengan judul "Citra Muslim", Jakarta: Erlangga, 1992
- Awang Dhany Armansyah, Akbar Nur Aziz, Perkembangan Tokoh dan Agama Islam di Pakistan, *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Penerbit Ombak.

- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Jilid IV, Cet.IV*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cetakan kelima, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Ira M. Lapidus, *A History of Islam Societies*, diterjemahkan oleh Ghuftron Mas'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Jams Hantings, *Ensiklopedia of Relegion and Ethics, Vol III*, New York: Charlos scriboer's Sont, 1908.
- John L Esposito, *Islam and Development and Sosioplitical Changes*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Mohammad Rizqillah Masykur, "PEMBAHARUAN ISLAM DI ASIA SELATAN PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL", Vol 3, no. 1, 2018
- Muh. Ilham Uslam, "Kontribusi Pemikiran Islam Sayyid Ahmad Khan Di Dunia Islam India," *Pappasang*, Vol 2, 2020.
- Muhammad Essa, Ammanullah Khan, "ENGLISH: Islamizing Pakistan: The Concept of Islamic Constitution Theory and Practice," *Rahatulquloob*, Vol 5, no. 2, 2021.
- Muhammad Fazlurrahman, "MODERNISASI PENDIDIKAN ISLAM: GAGASAN ALTERNATIF FAZLUR RAHMAN," *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol 1, no. 1 2018.
- Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1993.
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993
- Samdani, Pendidikan Islam di Pakistan, *Educational Journal: General and Specific Research*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Setiawan dkk. B, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid. XII, Cet. I; Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Sohaib Mukhtar, "Social Transformation of Pakistan Under The Speech of Muhammad Ali Jinnah on 11th August 1947", Vol 6, no. 1, 2018.
- Sultan Mahmood, Fakhr-ul-Islam, "Islam, Secularism and Idea of Pakistan," *Al-Azhar*, Vol 7, no. 2 2021.
- Ummu Mawaddah and Siti Karomah, "Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Pendidikan Modern Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, Vol 3, no. 1, 2018.
- Wulandari, Fitri. "Islam Dan Demokrasi Di Pakistan." *WI Tarikh* 02, no. 1 2021
- Zainuddin Sardar, *The Future of Muslim Civilization*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, dengan judul *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Cet.IV, Bandung: Mizan, 1993.

